



Membedah Laporan EITI

KAP SUKRISNO SARWOKO & SANDJAJA



Agenda

- 1 Apa itu EITI**
- 2 Komponen dalam Laporan EITI**
- 3 Penerapan Standar EITI 2013 dan Dampak Terhadap Laporan**
- 4 Signifikansi Laporan EITI terhadap Pembangunan di Daerah**

Apa itu

EITI

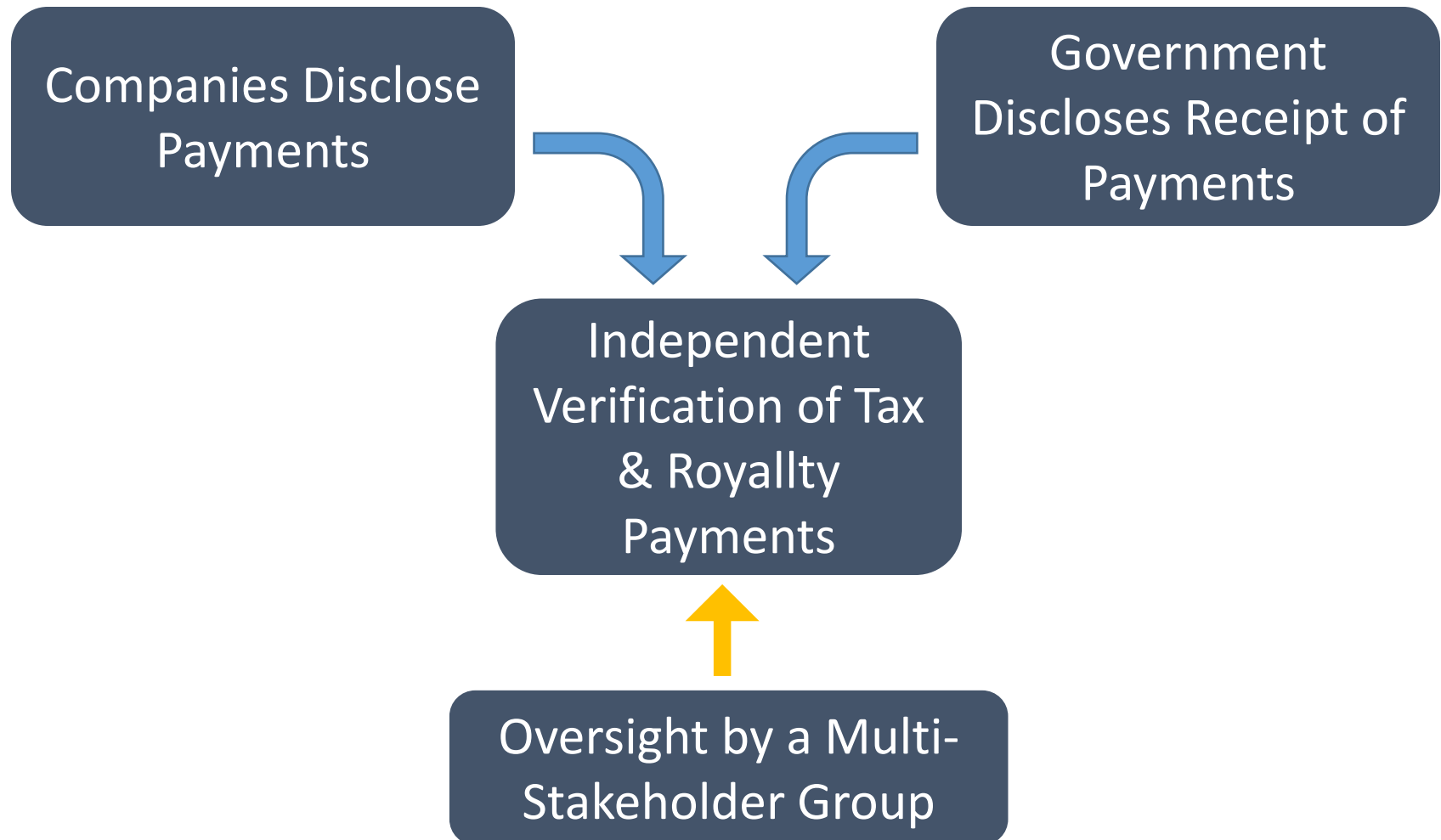
Apa itu EITI ?

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi untuk industri Ekstraktif adalah standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif; termasuk didalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batu bara. Untuk Indonesia, kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

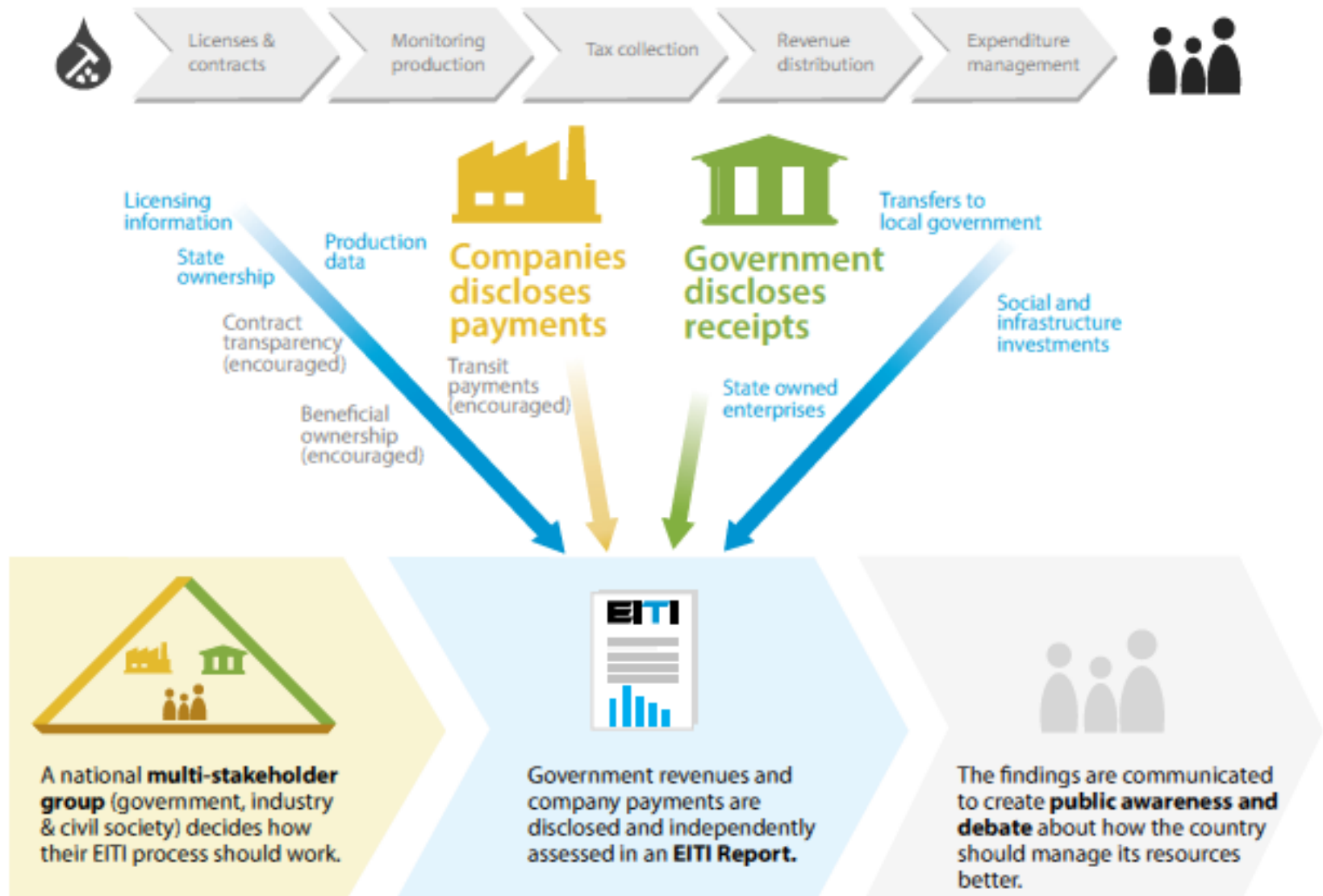
EITI memiliki tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam.

Apa itu EITI ?

Prinsip kerja dan proses EITI



Standar EITI



Entitas Pelapor Sektor Migas

Instansi Pemerintah :

- SKK Migas, Kementerian ESDM
- Ditjen Migas, Kementerian ESDM
- Dit PNB, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
- Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Riau

Kontraktor Migas :

- *Operator* adalah pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest* lainnya yang menjalankan kegiatan operasi Migas.
- *Non Operator* adalah pemegang *participating interest* yang tidak menjalankan kegiatan operasi Migas.
- *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.

Entitas Pelapor Sektor Minerba

Instansi Pemerintah :

- Ditjen Minerba, Kementerian ESDM
- Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan
- Dit PNB, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
- Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Riau

Perusahaan Minerba :

- Perusahaan Batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP-Batubara yang membayar royalty >25 M di tahun 2012 & 2013.
- Perusahaan Mineral pemegang kontrak KK-Mineral dan IUP-Mineral yang membayar royalty >25 M di tahun 2012 & 2013.



Komponen

Dalam Laporan EITI

Komponen dalam Laporan EITI



Contextual Report

Laporan yang berisi informasi konteks dari industri ekstraktif di Indonesia untuk memperkuat laporan EITI dalam rangka memperbaiki proses validasi dan tata kelola untuk memaksimalkan dampak dalam industri ekstraktif.



Reconciliation Report

Laporan yang berisi informasi rekonsiliasi penerimaan pajak dan non pajak yang berasal dari sektor migas dan minerba antara yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan diterima oleh pemerintah.

Komponen dalam Laporan EITI

Contextual Report

Contoh dari isi laporan kontekstual mencakup:

- Ringkasan Eksekutif
- Latar Belakang
- Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia
- Proses tender kontrak pertambangan migas dan perijinan pertambangan minerba
- Manajemen penerimaan Negara dan industri ekstraktif
- Pengelolaan industri ekstraktif
- Badan usaha milik Negara (BUMN)
- Kesimpulan dan rekomendasi

Komponen dalam Laporan EITI

Reconciliation Report

Contoh dari isi laporan rekonsiliasi mencakup:

- Ringkasan Eksekutif
- Ruang lingkup rekonsiliasi
- Metodologi
- Hasil rekonsiliasi
- Dana Bagi Hasil
- Prosedur audit
- Kesimpulan dan rekomendasi

Penerapan Standar EITI 2013

Dan Dampak Terhadap Laporan

Contextual Report

- A description of the legal framework and fiscal regime governing the extractive industries (Requirement 3.2)
- An overview of the extractive industries, including any significant exploration activities (Requirement 3.3)
- Where available, information about the contribution of the extractive industries to the economy for the fiscal year covered by the EITI Report (Requirement 3.4)
- Production data for the fiscal year covered by the EITI Report (Requirement 3.5)
- Information regarding state participation in the extractive industries (Requirement 3.6)

Contextual Report (lanjutan)

- Distribution of revenues from the extractive industries (Requirement 3.7)
- Any further information requested by the MSG on revenue management and expenditures (Requirement 3.8)
- Information on the licensing process and register (Requirement 3.9) and the allocation of the licenses (Requirement 3.10)
- Any information requested by the MSG on beneficial ownership (Requirement 3.11)

Reconciliation Report - Oil and Gas

Non-tax revenue:

- Revenue from oil production
- Revenue from gas production
- Revenue from crude oil
- Signature bonus
- Production bonus
- NOC Dividends
- Social expenditures

Taxes:

- Oil income tax
- Gas income tax
- Land and building tax
- Value added tax (VAT)
- Local tax and retribution

Reconciliation Report - **Minerals and Coal**

Non-tax revenue:

- Royalties
- Sales Revenue Share
- Dividends
- Dead rent
- Forestry fees
- Social expenditures

Taxes:

- Corporate income tax
- Land and building tax
- Other taxes and levels (regional taxes)

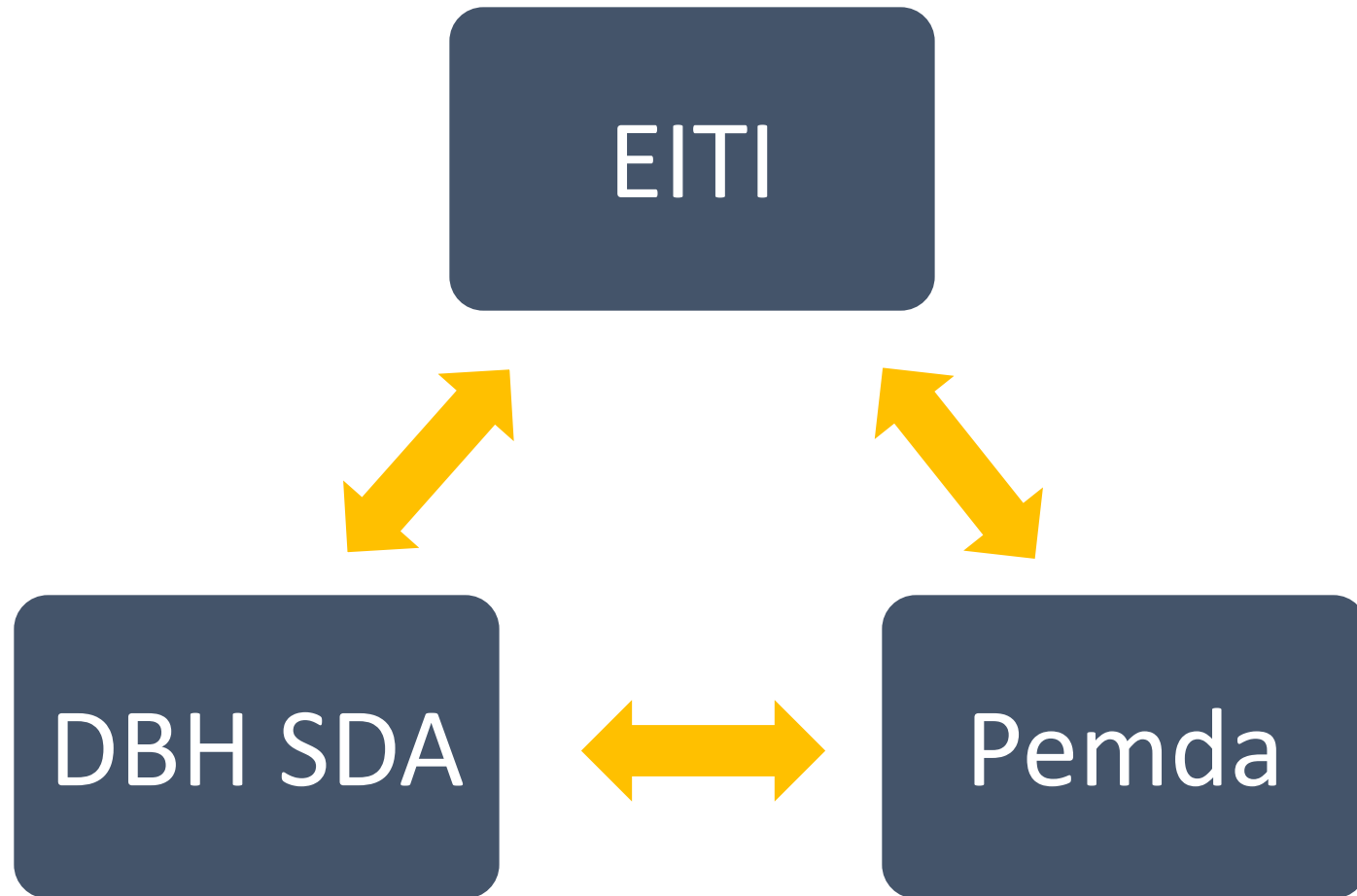
Additional commentary on scope

- The materiality and inclusion of sub-taxnational payments (Requirement 4.2(d))
- The disclosure and reconciliation of payments to and from state-owned enterprises (Requirement 4.2(c))
- The materiality and inclusion of sub-national transfers in accordance with Requirement 4.2(e)

Signifikansi Laporan EITI

Terhadap Pembangunan
Di Daerah

Hubungan antara EITI - DBH SDA - Pemda



Hubungan antara EITI dengan Pemda

Mulai tahun 2013 EITI International telah menerbitkan EITI standard yang baru.

Beberapa perubahan yang terkait dengan DBH SDA adalah:

- a. Berdasarkan requirement 4.2 (e) bahwa transfer DBH SDA Migas dan Pertum dari Pemerintah kepada seluruh Pemda yang selama ini belum menjadi bagian yang wajib dicantumkan dalam pelaporan telah diubah menjadi bagian yang wajib terdapat dalam laporan EITI;
- b. MSG **didorong** agar dapat melakukan rekonsiliasi data transfer tersebut dan menjelaskan apabila terdapat perbedaan data antara Pemerintah dengan Pemda-pemda, namun **rekonsiliasi data** tersebut **belum** menjadi suatu **kewajiban**.

Hubungan antara EITI dengan DBH SDA

Berdasarkan EITI requirement 4.2 (d) setiap pembayaran (yang jumlahnya material) oleh perusahaan kepada Pemda harus menjadi bagian dari Pelaporan EITI dan merupakan data yang wajib direkonsiliasi;

Pembayaran dimaksud dapat berupa **Pajak dan Retribusi Daerah**.

Dengan adanya laporan EITI, Pemda dituntut untuk menyampaikan penerimaan PDRD dari setiap perusahaan industri ekstraktif yang beroperasi di daerahnya.

Hubungan antara DBH SDA dengan Pemda

DBH:

Dana yang **bersumber dari APBN** yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan **angka persentase** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka **pelaksanaan desentralisasi**.

DBH SDA:

Bagian daerah yang berasal dari PNPB SDA Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi.

Cakupan/Jenis DBH-SDA



Prinsip Penyaluran

BY ORIGIN

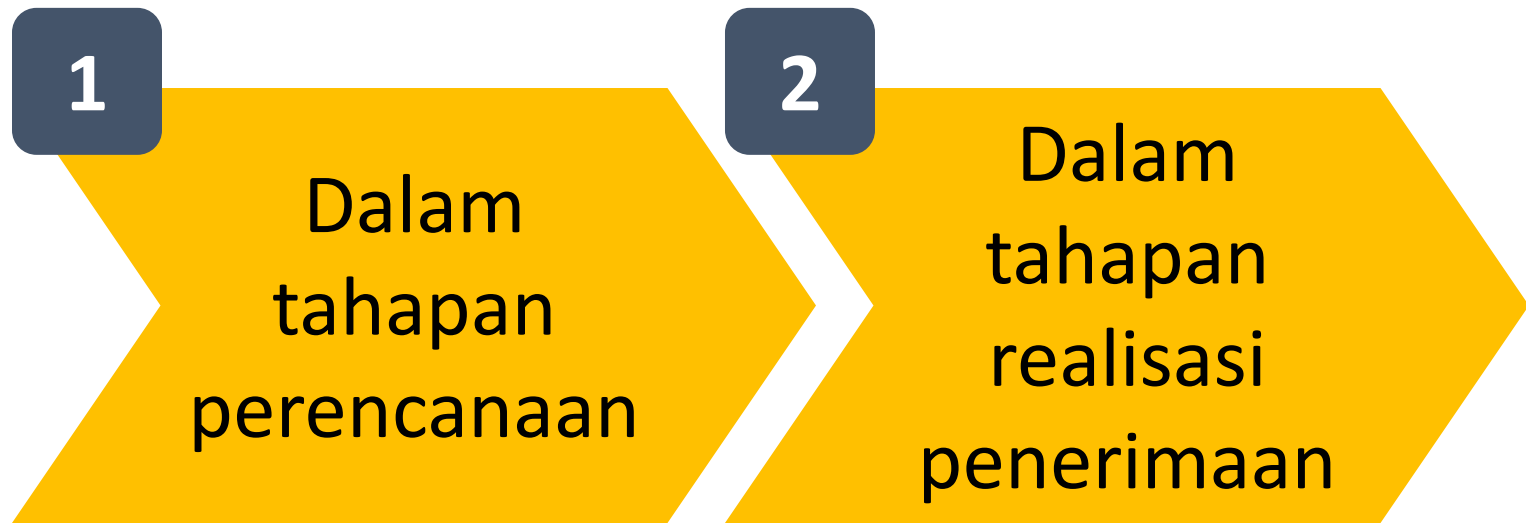
- **Daerah penghasil**
Mendapatkan porsi lebih besar
- **Daerah lain**
(dalam provinsi ybs.)
Mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu



BASED ON ACTUAL REVENUE

Penyaluran DBH SDA **berdasarkan realisasi penerimaan T.A. berjalan** (Ps. 23 UU 33/2004)

Peranan Pemda dalam transparansi penerimaan Industri Ekstraktif



Siklus DBH-SDA



1. Perencanaan Penerimaan masuk dalam APBN
2. PMK merupakan Perkiraan Alokasi
3. Rekonsiliasi dilaksanakan secara Rutin
4. Penyaluran mengikuti Pagu PMK/DIPA
5. APBD dapat lebih rendah/tinggi dari PMK

TERIMA KASIH